

**PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSIONALISME**

SKRIPSI



OLEH :

BAHARUDDIN RIQIEY
NBI : 1312000158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSIONALISME**

SKRIPSI



Oleh:

BAHARUDDIN RIQIEY
NBI: 1312000158

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH:

BAHARUDDIN RIQIEY

NBI: 1312000158

Dosen Pembimbing



Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP: 20310130611

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME

Oleh:

BAHARUDDIN RIQIEY
NBI: 1312000158

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 8 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:/SK/FH/...../2023
Tanggal : 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**
NPP: 20310130611

Sekretaris : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NPP: 20310930349

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP: 20310160711

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin Riqiey

NIM : 1312000158

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**“PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Baharuddin Riqiey



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharuddin Riqiey
NBI : 1312000158
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**PEMBATASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Baharuddin Riqiey)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tulisan karya ilmiah terakhir pada strata S1 ini, yang masih jauh dari kata sempurna semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan penulis dalam ikhtiar mencapai cita-cita. Terkhusus untuk:

Nurul Yaqin Chotib, dan Ririn Hermawanti

Selaku orang tua tercinta penulis yang dengan kesabaran dan keikhlasannya, mendedikasikan pikiran dan tenaganya bagi putra-putranya.

Serta untuk pemangku kebijakan semoga dapat menjadi refrensi untuk pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR. Dan tak lupa karya ilmiah ini saya peruntukkan pada almamater tercinta penulis yakni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menuntun perjalanan akademik dan non akademik penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkah, ridha dan inayah-Nya, Skripsi dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusionalisme” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kegalauan dan keprihatinan Penulis mengenai masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak memiliki batasan. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menganut prinsip konstitusionalisme yang dibuktikan dengan adanya pembatasan masa jabatan terhadap Presiden, Anggota BPK, Hakim MA, Anggota KY, dan Hakim MK. Untuk itu, dalam Skripsi ini dilakukan pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 yakni prinsip konstitusionalisme.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketegasan, sehingga anak kedua ini dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik sampai jenjang sarjana.
2. Kakak Penulis yang telah memberi motivasi, doa, dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.
3. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., yang telah bersedia dan berkenan untuk menjadi Dosen Pembimbing di tengah kesibukan amanah ilmiahnya dan selalu dengan keramahan memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat serta memberikan kerangka berfikir yang baik kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak terhingga.
4. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan staf yang telah memberikan pelayanan prima selama Penulis menempuh studi.
5. Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama menempuh studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga.

6. Penguji Proposal Skripsi Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Penguji dan Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran dan koreksi terhadap Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga.
7. Kucing saya yakni Opet yang telah menghibur saya ketika sedang jenuh mengerjakan Skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan peserta Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2020, Probojati Bayu Herlambang, Rio Aldino Yosevan Silalahi, Pandu Satriawan Zainulla, Naura Darrin Hasan, Miftaqul Janah dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama selama menempuh studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian terkait dengan ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan prinsip konstitusionalisme dan menjelaskan urgensi diaturnya mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif konstitusionalisme. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 karena: (1) Tidak sesuai dengan hakikat konstitusionalisme, (2) Tidak sesuai dengan demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia, (3) Membuka peluang terjadinya absolutisme kekuasaan, (4) Tidak mampu memberikan kepastian hukum, (5) Tidak mampu menyehatkan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, (6) Tidak mampu mencegah otoritarianisme, dan (7) Tidak mampu menciptakan regenerisasi kepemimpinan. Sementara urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk (1) Menegakkan prinsip konstitusionalisme, (2) Mencegah tindakan sewenang-wenang, (3) Mewujudkan kepastian hukum, (4) Menyehatkan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, (5) Mencegah otoritarianisme, dan (6) Melakukan regenerisasi.

Kata Kunci : Pembatasan, Masa Jabatan, DPR, Konstitusionalisme.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the compatibility regarding the absence of regulations regarding term limits for members of the House of Representative in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the principles of constitutionalism and to explain the urgency of regulating term limits for members of the House of Representative from a constitutionalism perspective. This research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The results of this research show that the absence of regulations regarding term limits for members of the House of Representative in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is not in accordance with the principles of constitutionalism adopted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because: (1) It is not in accordance with the essence of constitutionalism, (2) It is not in accordance with with the constitutional democracy adopted by Indonesia, (3) Opens opportunities for absolutism of power, (4) Not able to provide legal certainty, (5) Not able to make the implementation of democracy healthy in Indonesia, (6) Not able to prevent authoritarianism, and (7) Not able to create leadership regeneration. Meanwhile, the urgency of limiting the terms of office of members of the People's Representative Council is to (1) uphold the principles of constitutionalism, (2) prevent arbitrary actions, (3) realize legal certainty, (4) improve the implementation of democracy in Indonesia, (5) prevent authoritarianism, and (6) Carrying out regeneration.

Keywords: Limitations, Term of Office, DPR, Constitutionalism.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Metode Pendekatan	4
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	4
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Konstitusi.....	7
2.2 Teori Negara Hukum.....	15
2.3 Konsep Konstitusionalisme.....	20
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Ketiadaan Pengaturan Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusionalisme	27
3.2 Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	50
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Simpulan.....	67
4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN	69